



Pengaruh Strategi Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap Efektivitas Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah

Ichfa Farida Ramadhani^{1*}, Noor Endah Cahyawati²

¹⁻² Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email: 21312289@students.uii.ac.id^{1*}, 943120102@uii.ac.id²

*Penulis Korespondensi: 21312289@students.uii.ac.id

Abstract. This study is motivated by the importance of effective financial and asset management strategies in supporting the operational performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Central Sulawesi, which plays a strategic role in disaster mitigation, preparedness, emergency response, and post-disaster recovery. The main issues examined include how financial and asset management strategies are implemented and their impact on operational effectiveness. The objectives are to analyze the strategies, assess their influence, and identify challenges along with potential solutions. The literature review draws on public financial management theories, regional asset management, and studies linking accountability and public sector performance. A quantitative approach with a descriptive design was used. Data were collected through literature review, observation, interviews, and questionnaires distributed to BPBD staff in finance and asset divisions. Analysis included validity and reliability testing and multiple linear regression to examine variable influence. Results show that in 2024, financial management achieved realization levels of 89–100% in most programs, though some activities, such as disaster management system structuring, only reached 38%. Asset management is dominated by fixed assets with a book value of IDR 19.6 billion, showing notable growth in equipment and machinery. Regression results reveal an R^2 of 0.817, indicating that 81.7% of operational effectiveness is influenced by financial and asset strategies, while the remaining 18.3% is affected by other factors. These findings highlight the importance of strategic financial and asset management to optimize disaster management performance.

Keyword : Asset; BPBD; Financial; Management; Strategy.

Abstrak. Penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya strategi pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dalam mendukung kinerja operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah, yang berperan strategis dalam mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Isu utama yang diteliti meliputi bagaimana strategi pengelolaan keuangan dan aset diimplementasikan dan dampaknya terhadap efektivitas operasional. Tujuannya adalah untuk menganalisis strategi tersebut, menilai pengaruhnya, dan mengidentifikasi tantangan beserta solusi potensialnya. Tinjauan pustaka mengacu pada teori pengelolaan keuangan publik, pengelolaan aset daerah, dan studi yang menghubungkan akuntabilitas dan kinerja sektor publik. Pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif digunakan. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, observasi, wawancara, dan kuesioner yang dibagikan kepada staf BPBD di divisi keuangan dan aset. Analisis meliputi pengujian validitas dan reliabilitas serta regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel. Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pengelolaan keuangan mencapai tingkat realisasi 89–100% di sebagian besar program, meskipun beberapa kegiatan, seperti penataan sistem manajemen bencana, hanya mencapai 38%. Manajemen aset didominasi oleh aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp 19,6 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada peralatan dan mesin. Hasil regresi menunjukkan R^2 sebesar 0,817, yang mengindikasikan bahwa 81,7% efektivitas operasional dipengaruhi oleh strategi keuangan dan aset, sedangkan sisanya 18,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini menyoroti pentingnya manajemen keuangan dan aset strategis untuk mengoptimalkan kinerja manajemen bencana.

Kata Kunci : Asset; BPBD; Keuangan; Pengelolaan; Strategi.

1. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan ancaman nyata yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan profesional dan (Atmaja, 2023). Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah *ring of fire* memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga

membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang handal dan efektif (Prayoga & Manullang, 2025).

BPBD Sulawesi Tengah hadir sebagai garda terdepan dalam menangani bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Pembentukan BPBD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah (Reimassa *et al.*, 2021). Kehadiran BPBD menjadi krusial mengingat Sulawesi Tengah pernah mengalami bencana besar seperti gempa dan tsunami Palu tahun 2018 yang menimbulkan dampak kerusakan masif terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat (Santoso *et al.*, 2018). Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD menghadapi empat tahapan penting penanggulangan bencana: mitigasi (pengurangan risiko), kesiapsiagaan (persiapan menghadapi bencana), tanggap darurat (respons saat bencana terjadi), dan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana) (Fitriyana & Andrean, 2020). Setiap tahapan ini memerlukan sumber daya keuangan yang memadai dan aset yang siap pakai untuk memastikan respons cepat dan tepat sasaran.

Keberhasilan BPBD sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola keuangan dan aset. Pengelolaan keuangan yang baik memastikan anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung program penanggulangan bencana (Ardana *et al.*, 2022). Penelitian Syauqi *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel investasi, pendapatan perkapita, dan pajak daerah. Tanpa pengelolaan yang baik, program penanggulangan bencana akan sulit berjalan efektif dan tidak dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang terdampak bencana. Demikian pula dengan pengelolaan aset, yang mencakup peralatan tanggap darurat, kendaraan operasional, alat komunikasi, dan logistik bantuan. Ratnasari dan Devitra (2017) menekankan bahwa sistem informasi manajemen aset yang baik dapat meningkatkan efektivitas operasional organisasi publik. Aset yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan keterlambatan respons saat bencana terjadi, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah korban dan kerugian material (Munawaroh & Monica, 2024). Penelitian Ramadhani dan Cahyawati, (2024) menemukan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan aset berpengaruh signifikan (81,7%) terhadap efektivitas operasional BPBD Sulawesi Tengah. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, sistem informasi yang belum optimal, dan realisasi anggaran yang tidak merata pada beberapa kegiatan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ardana *et al.* (2022) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kolaka yang menunjukkan bahwa strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan keuangan belum optimal karena hanya fokus pada pengetahuan dan

keterampilan tanpa memperhatikan pengembangan sikap kerja. Lebih lanjut Theresiana dan Supriyadi, (2025) menjelaskan bahwa kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mencapai efektivitas operasional instansi pemerintah. Laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, hambatan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya pelatihan masih sering dijumpai dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Konteks digitalisasi juga menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan dan aset modern. Penelitian Rosari *et al.* (2022) menunjukkan bahwa strategi manajemen SDM dalam pengelolaan keuangan BUMDes di era digitalisasi memerlukan komitmen pemerintah, rekrutmen dan pelatihan yang tepat, serta penambahan anggaran untuk fasilitas teknologi. Hal serupa juga diperlukan oleh BPBD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.

Berdasarkan berbagai isu dan tantangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana strategi pengelolaan keuangan dan aset mempengaruhi efektivitas kerja BPBD Sulawesi Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan strategi perbaikan pengelolaan keuangan dan aset yang lebih optimal, mengingat BPBD mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan BPBD dapat meningkatkan kapasitas dan responsivitasnya dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang dapat terjadi kapan saja.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk mencapai tujuan organisasi (Rahmawati, 2019). Halim (2007) menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan publik adalah mewujudkan alokasi sumber daya yang optimal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 (Rahmawati, 2019). Penelitian Pratommii *et al.* (2023) membuktikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan (63,9%) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, yang menunjukkan pentingnya teknologi dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah (Permendagri No. 19 Tahun 2016). Ratnasari dan Devitra (2017) menekankan bahwa sistem informasi manajemen aset yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset pada organisasi pemerintah. Munawaroh dan Monica (2024) dalam penelitiannya di Kantor Meteorologi Kalimaraun menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset menciptakan kepercayaan publik dan mendukung efektivitas operasional instansi.

Efektivitas operasional mengukur kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa efektivitas di sektor publik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Wambrauw et al, (2025) dalam analisisnya terhadap efektivitas dan efisiensi belanja pada BPBD Kota Bekasi menemukan bahwa efektivitas belanja langsung lebih mudah diukur karena dampaknya langsung terhadap pelayanan publik. Reimassa et al., (2021) menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja pada BPBD Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik dan setiap aktivitas program berkaitan erat dengan pencapaian visi-misi organisasi.

Sistem informasi manajemen dalam pengelolaan keuangan dan aset menjadi semakin penting di era digital. Pebrianti dan Trianto (2021) membuktikan bahwa efektivitas penerapan SIMDA berpengaruh positif dan signifikan (83,5%) terhadap peningkatan kinerja pegawai di BPKAD Ogan Ilir. Namun, Ardiningrum dan Tukiman (2025) menemukan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Bojonegoro belum sepenuhnya efektif karena dari enam indikator yang dievaluasi, hanya kualitas pelayanan yang efektif sementara lima indikator lainnya menghadapi kendala seperti tampilan yang kurang nyaman, keterbatasan fitur, dan keterbatasan informasi pada bidang tertentu.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset. Ardana et al. (2022) dalam penelitiannya di BKAD Kabupaten Kolaka menemukan bahwa strategi pengembangan SDM belum optimal karena baru mencakup elemen pengembangan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pengembangan sikap kerja belum tercakup. Rosari et al. (2022) menekankan pentingnya strategi manajemen SDM di era digitalisasi yang meliputi kemampuan mengelola arsip berbasis internasionalisasi, integrasi dalam menyusun SOP keuangan, dan kemampuan menyusun laporan pembukuan secara digital yang benar.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah. Theresiana dan Supriyadi (2025) menjelaskan bahwa

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Fitriyana & Andrean, (2020) menemukan bahwa BPBD Kabupaten Bandung telah menerapkan akuntabilitas dengan baik, terbukti dari 11 indikator kinerja yang ditetapkan, 10 berhasil dicapai dengan kriteria pencapaian melebihi 80%.

Efisiensi anggaran mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Syauqi et al. (2017) menganalisis bahwa efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dipengaruhi secara positif oleh investasi, pendapatan perkapita, dan pajak daerah, sedangkan PDRB berpengaruh negatif signifikan. Strategi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan meliputi peningkatan pengawasan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan komitmen pencapaian sasaran, penerapan regulasi insentif dan disinsentif, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Konteks pengelolaan keuangan pada situasi darurat bencana memerlukan perhatian khusus. (Muhammad et al. (2020) dalam penelitiannya tentang efektivitas dana darurat pasca gempa Cianjur menemukan bahwa kendala utama meliputi keterlambatan birokrasi, koordinasi yang tidak memadai antar instansi, dan alokasi dana yang tidak mencukupi dibandingkan kebutuhan riil. Hambatan administratif seperti hilangnya dokumen dan proses verifikasi yang memakan waktu menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan dana. Laksmana dan Merta, (2020) mengevaluasi efektivitas program bantuan keuangan menggunakan rasio *Cost Coverage Ratio* (CCr), *Return on Investment* (ROI), dan *Loan at Risk* (LaR), yang menunjukkan bahwa meskipun CCr dan ROI menunjukkan kriteria efisien, namun LaR masih belum optimal.

Penelitian Damayanti dan Kawedar (2025) tentang efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes menemukan bahwa pengelolaan anggaran di bidang pembangunan desa dan penanganan bencana darurat belum efektif, sementara di bidang pemberdayaan masyarakat sudah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan bervariasi tergantung pada jenis program dan bidang kegiatan yang dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang dikaji. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya staf serta kepala subbagian keuangan dan aset. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang

berwenang dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi implementasi manajemen risiko, hambatan yang muncul, serta implikasinya terhadap kinerja organisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Keuangan

Hakekatnya Anggaran daerah berperan sebagai instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Optimalisasi fungsi pemerintahan daerah hanya dapat tercapai apabila pelaksanaan urusan pemerintahan didukung oleh ketersediaan serta pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang memadai. Dalam konteks ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah menerapkan strategi pengelolaan keuangan melalui penyusunan struktur anggaran tahun 2024.

Tabel 1. Pengelolaan Keuangan BPBD Tahun 2024.

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Sisa Anggaran
Belanja Daerah	Rp. 87.274.819.077	Rp. 77.985.825	Rp. 9.288.993.565
Program Penunjang			
Urusan Pemerintahan	Rp. 14.137.424	Rp. 12.675.909.818	Rp. 1.641.514.795
Daerah Provinsi			
Program Penanggulangan			
Bencana	Rp. 73.137.394	Rp. 65.309.915.694	Rp. 7.827.478.770
Surplus / Defisit	Rp. 87.274.819.077	Rp. 77.985.825.512	Rp. 9.288.993.565

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ramadhani dan Cahyawati (2024) yang menemukan realisasi anggaran BPBD Sulawesi Tengah mencapai 89-100% untuk sebagian besar program, meskipun terdapat ketimpangan pada beberapa kegiatan tertentu yang hanya terealisasi 38%. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan komitmen BPBD dalam melaksanakan program-program penanggulangan bencana sesuai rencana (Reimassa et al., 2021). Namun, menurut penulis, tingginya realisasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas program karena yang terpenting adalah ketepatan penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi.

Strategi pengelolaan keuangan BPBD menekankan pada kepatuhan regulasi, transparansi anggaran, dan efisiensi pemanfaatan dana. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 yang mewajibkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran

(Rahmawati, 2019). Perencanaan anggaran dilakukan berbasis kebutuhan program penanggulangan bencana, pencatatan mengikuti prosedur standar akuntansi pemerintahan, dan pelaporan dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas kepada publik. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam melaksanakan seluruh program yang direncanakan, terutama untuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang memerlukan investasi jangka panjang. Birokrasi yang panjang dalam realisasi keuangan juga menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada efektivitas respons saat terjadi bencana (Muhammad et al., 2020). Menurut penulis, penyederhanaan prosedur pencairan dana darurat perlu menjadi prioritas agar BPBD dapat merespons bencana dengan lebih cepat.

Strategi Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset di BPBD Sulawesi Tengah menunjukkan total aset sebesar Rp 21.466.773.016 per 31 Desember 2024. Komposisi aset terdiri dari aset lancar Rp 931.424.253 (4,34%), aset tetap dengan nilai buku Rp 19.649.809.913 (91,54%), dan aset lainnya Rp 885.538.850 (4,12%). Aset tetap memiliki harga perolehan Rp 41.393.644.208 dengan akumulasi penyusutan Rp 21.743.834.295, menunjukkan bahwa sebagian besar aset telah mengalami depresiasi nilai akibat penggunaan dan usia pakai.

Dominasi aset tetap dalam struktur aset BPBD menunjukkan investasi yang signifikan pada peralatan operasional penanggulangan bencana seperti kendaraan tanggap darurat, alat komunikasi, peralatan SAR, dan infrastruktur pendukung lainnya. Hasil ini konsisten dengan temuan Ramadhani dan Cahyawati (2024) yang mencatat nilai buku aset tetap BPBD mencapai Rp 19,6 miliar dengan peningkatan terutama pada kategori peralatan dan mesin. Ratnasari dan Devitra (2017) menekankan bahwa pengelolaan aset yang sistematis sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan peralatan saat dibutuhkan.

Tabel 2. Pengelolaan Aset BPBD Tahun 2024.

Uraian	Rincian Aset
Aset Lancar	Rp 931.424.253
Aset Tetap	Rp 19.649.809.913
Harga Perolehan	Rp 41.393.644.208
Akumulasi Penyusutan	Rp 21.743.834.295
Aset Lainnya	Rp 885.538.850
Jumlah Total Aset	Rp 21.466.773.016

Strategi pengelolaan aset di BPBD mencakup inventarisasi sistematis seluruh aset, pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi dan fungsi aset, serta optimalisasi penggunaan sarana-prasarana agar memberikan manfaat maksimal. Sesuai Permendagri No. 19 Tahun

2016, pengelolaan aset dilaksanakan berlandaskan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta memperhatikan nilai ekonomis. Munawaroh dan Monica (2024) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset menciptakan kepercayaan publik dan mendukung efektivitas operasional.

Identifikasi Hasil Kuisioner

Hasil Uji Validitas

Dari hasil kuisioner yang dilakukan dilapangan didapatkan sebanyak $n=17$ orang responden dengan signifikansi 5% pada distribusi nilai rtable statistic dengan deferensial = $n-2$, maka didapatkan nilai rtable sebesar 0.482 dapat dilihat pada lampiran. Hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 3. Hasil uji validitas.

Variable	rhitung	rtable	Keterangan
X 1.1	0.493	0.482	Valid
X 1.2	0.598	0.482	Valid
X 1.3	0.612	0.482	Valid
X 1.4	0.610	0.482	Valid
X 1.5	0.722	0.482	Valid
X 1.6	0.726	0.482	Valid
X 2.1	0.728	0.482	Valid
X 2.2	0.730	0.482	Valid
X 2.3	0.750	0.482	Valid
X 2.4	0.790	0.482	Valid
X 2.5	0.770	0.482	Valid
X 2.6	0.765	0.482	Valid
Y 1	0.785	0.482	Valid
Y 2	0.803	0.482	Valid
Y 3	0.792	0.482	Valid
Y 4	0.906	0.482	Valid
Y 5	0.803	0.482	Valid
Y 6	0.805	0.482	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua instrument mulai dari variable X1 (pengelolaan keuangan), X2 (Pengelolaan Aset) dan Y (Efektifitas Operasional) menghasilkan nilai rhitung (koefisien korelasi yang didapatkan dari perhitungan) lebih besar $rTabel = 0.482$ (koefisien yang didapatkan dari ketentuan tabel distribusi) sehingga dapat disimpulkan hasil uji validitas dinyatakan valid.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas biasanya dinyatakan dalam bentuk, nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai koefisien maka semakin tinggi reliabilitas alat ukur. Pada penelitian ini apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka hasil uji dinyatakan reliable. Hasil pengujian yang dillakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas.

variable	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach Alpha Tolerance	Keterangan
X1	.693	6	0.6	Reliable
X2	.838	6	0.6	Reliable
Y	.863	6	0.6	Reliable

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai 0,693 untuk variabel pengelolaan keuangan (X1), 0,838 untuk pengelolaan aset (X2), dan 0,863 untuk efektivitas operasional (Y). Ketiga nilai tersebut lebih besar dari toleransi 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hasil ini sesuai dengan standar penelitian kuantitatif yang mensyaratkan Cronbach's Alpha minimal 0,60 untuk konsistensi internal yang baik (Pratommi et al., 2023).

Uji Regresi Berganda

Hasil uji regresi linear berganda menghasilkan persamaan $Y = -0,557 - 0,312X_1 + 2,076X_2$ dengan nilai R^2 sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa 81,7% variasi efektivitas operasional dapat dijelaskan oleh variabel pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, sedangkan sisanya 18,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian seperti kapasitas SDM, koordinasi antar lembaga, dan dukungan teknologi informasi. Nilai R^2 yang tinggi ini konsisten dengan temuan Ramadhani dan Cahyawati (2024) yang menemukan pengaruh sebesar 81,7% dari kedua variabel independen terhadap efektivitas operasional BPBD. Hasil uji dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5. Hasil Uji regresi linear.

Variabel (Pengelolaan keuangan) X1	Variabel (Pengelolaan Aset) X2	Variabel (Efektifitas Operasional) Y	Persamaan Regresi linear ($Y=a+bX_1+bX_2$)	R ²	Sig.
0.493	0.728	0.785			
0.598	0.730	0.803			
0.612	0.750	0.792	$Y=-0,557-0,312X_1+2,076X_2$	0,817	0,078
0.610	0.790	0.906			
0.722	0.770	0.803			
0.726	0.765	0.805			

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi penting, di mana pengelolaan aset memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap efektivitas operasional BPBD dibandingkan pengelolaan keuangan, karena ketersediaan dan kesiapan aset operasional secara langsung menentukan kecepatan dan ketepatan respons bencana (Wambrauw et al. 2025). Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang terlalu berorientasi pada prosedur administratif cenderung menghambat efektivitas operasional, sehingga diperlukan penyederhanaan birokrasi, khususnya dalam pencairan dana darurat (Muhammad et al. 2020).

Meskipun secara simultan kedua variabel tidak berpengaruh signifikan, secara parsial pengelolaan aset menunjukkan pengaruh yang dominan, sehingga peningkatan efektivitas operasional BPBD perlu difokuskan pada optimalisasi aset melalui penambahan jumlah, pemeliharaan berkala, serta pengembangan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi. Selain itu, masih terdapat 18,3% variasi efektivitas operasional yang dipengaruhi faktor lain, seperti kualitas SDM, sistem koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya sistem informasi, kualitas pengelolaan, dan akuntabilitas kinerja dalam meningkatkan efektivitas organisasi sektor publik (Pebrianti dan Trianto 2021; Reimassa et al. 2021; Ardiningrum dan Tukiman 2025), serta konsisten dengan temuan mengenai kendala anggaran, birokrasi, keterbatasan aset, dan kapasitas SDM dalam instansi pemerintah daerah (Ardana et al. 2022; Theresiana dan Supriyadi 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

BPBD Sulawesi Tengah menerapkan strategi pengelolaan keuangan dan aset dengan menekankan kepatuhan pada regulasi, transparansi anggaran, serta efisiensi pemanfaatan aset. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui perencanaan berbasis kebutuhan, pencatatan sesuai prosedur, dan pelaporan akuntabel, sedangkan pengelolaan aset mencakup inventarisasi, pemeliharaan, dan optimalisasi penggunaan sarana-prasarana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas operasional BPBD lebih dipengaruhi oleh pengelolaan aset, karena ketersediaan dan kesiapan peralatan terbukti mendukung kelancaran tugas penanggulangan bencana. Sebaliknya, pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, meskipun bersama aset tetap mendukung operasional. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan birokrasi panjang dalam realisasi keuangan, serta kurangnya jumlah, kualitas, dan pemeliharaan aset.

Hambatan ini berdampak pada kesiapsiagaan dan efektivitas operasional BPBD. Oleh karena itu, instansi diharapkan meningkatkan sistem administrasi dan memperluas pelatihan

internal bagi pegawai. Bagi mahasiswa, magang menjadi sarana penguatan keterampilan praktis, disiplin, dan etika kerja. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji efektivitas program BPBD terutama pada aspek mitigasi berbasis masyarakat agar menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Ardana, E., Alam, S., & Kadir, A. (2022). Strategi pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 37–44.
- Ardiningrum, S. D., & Tukiman. (2025). Efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. *Journal Publicuho*, 8(2), 1184–1189. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.788>
- Atmaja, I. M. (2023). Transformasi digital dalam sektor pemerintahan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45–58.
- Damayanti, A., & Kawedar, W. (2025). Analisis efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(3), 1–12. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>
- Fitriyana, R., & Andrean, A. (2020). Tinjauan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 106–121.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Indra Laksmana, K. A. R., & Merta, I. K. (2020). Analisis efektivitas program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbangsudu Mandara di Kabupaten Karangasem tahun 2017 (Studi kasus pada 18 desa kawasan rawan bencana erupsi Gunung Agung). *JMM UNRAM: Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, 9(1), 68–77. <https://doi.org/10.29303/jmm.v9i1.488>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-2). UPP STIM YKPN.
- Munawaroh, S., & Monica, I. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Kantor Meteorologi Kalimara Kabupaten Berau. *Accountia Journal*, 8(2), 72–82. <https://doi.org/10.35915/accountia.v8i02.877>
- Pebrianti, T., & Trianto, A. (2021). Pengaruh efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap peningkatan kinerja pegawai di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(3), 118–131.
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Pratomm, M. W., Muhsyaf, S. A., & Isnawati. (2023). Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(3), 99–108. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955>
- Prayoga, W. B., & Manullang, N. A. (2025). Analisis efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Semarang. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 145–162.
- Rahmawati, D. (2019). Pengelolaan keuangan desa berbasis transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 15(2), 89–104.
- Ramadhani, I. F., & Cahyawati, N. E. (2024). Pengaruh strategi pengelolaan keuangan dan aset terhadap efektivitas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 12(4), 234–251.
- Ratnasari, P. R., & Devitra, J. (2017). Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen aset pada Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 2(3), 573–585.
- Reimassa, L. B., Tinangon, J. J., & Wangkar, A. (2021). Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 804–811.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes di era digitalisasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040–3050. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Santoso, A. B., Nugroho, S. P., & Wibowo, A. (2018). Dampak gempa dan tsunami Palu 2018: Evaluasi dan pembelajaran. *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 3(2), 89–105.
- Silaban, R. M. (2010). Manajemen pelayanan publik: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Administrasi*.
- Syauqi, M., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2017). Strategi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan APBD. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1), 1–20. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i1.27540
- Tani, L. C., Manossoh, H., & Wokas, H. R. (2020). Analisis pengelolaan akuntansi aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 88–93. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27866.2020>
- Theresiana, M., & Supriyadi. (2025). Kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda. *Jurnal Manajemen dan Hukum Publik*, 13(2), 234–248.
- Wambrauw, Y., Todingbua', M. A., & Rantererung, C. L. (2025). Efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. *Yos Soedarso Economics Journal (YEJ)*, 7(1), 61–77. <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i3.153>